

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI KABUPATEN ACEH UTARA

Ghazali Syamni^{1*)}, Zaafri Husodo²⁾, dan Syarifuddin³⁾

¹Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

^{*)} syamsi_ghazali@yahoo.com

²Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

²PPIM Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

ABSTRACT

The objectives this research is to analyze the relationship legal revenue to expenditures in North Aceh. The data used in this study are reported revenue realization consisting of local taxes, retribution, and other legal revenue to particular expenditure direct in North Aceh for 30 years from 1982 -2011. The method used in this study is multiple regression analysis. The results found that the revenue associated with direct expenditure in the North Aceh. This indicates that the higher the revenue, the greater the direct spending by an area. Subsequently other findings in this study are all components of tax revenue in this case, retribution, etc. legitimate income also affect direct spending. These findings indicate the government of the district or other government in Indonesia to be more active in raising revenue. But in the process of determination procedures or approaches that investment pro investment.

Keywords: *relationship, legal revenue, expenditures, north Aceh*

1. Pendahuluan

Aceh Utara yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. pada tahun 1999 terbentuknya daerah pemekaran baru yaitu Kabupaten Bireuen, dan kemudian pada tahun 2001 Aceh Utara dimekarkan lagi, dan lahirlah serta terbentuknya Kota Lhokseumawe. Sehingga Kabupaten Aceh Utara yang semula adalah satu daerah otonom kabupaten, sudah menjadi tiga daerah otonom yakni d Kabupaten Aceh Utara sebagai kabupaten induk, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe sebagai Kabupaten/Kota yang baru. Setelah terjadinya pemekaran tersebut tentu saja Kabupaten Aceh Utara sedikit mengalami kendala dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan wilayahnya. Hal tersebut terjadi karena akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah, yang disebabkan oleh pendapatan asli daerah telah terbagi dengan dua daerah pemekaran lainnya. Di

samping itu, habisnya sumber daya alam (cadangan Migas) yang ada di bumi Aceh Utara juga menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya, begitu juga sebaliknya, karena itulah terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Penurunan pendapatan asli daerah berimbas pada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui belanja langsung. Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pembiayaan pengeluarannya yang dianggarkan dalam Belanja langsung Daerah salah satunya dapat dilihat dari jumlah PAD belum menunjukkan persentase yang mengembirakan, bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan non PAD, dimana

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih sangat tergantung pada bantuan dana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta bantuan dana lainnya. Kontribusi PAD terhadap Belanja Langsung Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Kontribusi PAD terhadap Belanja Langsung
Kab. Aceh Utara 2007-2011

No.	Tahun Anggaran	Belanja Langsung (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2007	624.362.078.792,18	101.357.843.058,18	16,23
2	2008	773.470.288.656,02	79.720.897.562,69	10,30
3	2009	663.090.081.657,15	79.924.769.604,31	12,05
4	2010	332.956.839.049,70	31.199.095.431,22	09,37
5	2011	485.305.273.277,00	42.269.082.420,46	08,70
Rata-rata		575.836.912.286,20	66.894.337.615,37	11,61

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Utara

Tabel 1 memperlihatkan bahwa besaran PAD Kabupaten Aceh Utara pada periode 2007-2011 cenderung menurun dan kontribusinya terhadap belanja langsung relatif kecil, sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Dalam Qanun No.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dikatakan Pendapatan Asli Aceh yang disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Pratiwi, 2007).

Selanjutnya, Belanja Daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, atau dengan kata lain belanja daerah adalah semua pengeluaran kas

daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Joncto Nomor 13 Tahun 2006). Halim (2007) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Yuwono, dkk. 2005)

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Joncto Nomor 13 Tahun 2006 dibagikan belanja daerah ke dalam dua bagian, yaitu: belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari :Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berkaitan dengan belanja ini, Saragih (2005) mengatakan sebaiknya biaya tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal atau kegiatan yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan hasil yang berbeda antar penelitian tersebut. Prokosa (2004); Maemunah (2006); dan Hartati (2009), memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dkk. (2009) memperoleh hasil bahwa PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja langsung.

Dari beberapa hal di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh PAD terdiri dari; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Dalam penelitiannya ini lain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak digunakan/dipakai, karena pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sangat sedikit dan tidak diperoleh disetiap tahun.

2. Metode Penelitian

Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah serta Belanja daerah khususnya belanja langsung Kabupaten Aceh Utara yaitu APBDnya dalam runtun waktu selama 30 tahun dari 1982–2011.

Model Analisis Data

Metode Analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2007). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003).

Dalam penelitian ini, tiga komponen dari pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah sebagai variabel independen, akan dianalisis hubungannya dengan belanja daerah yang diukur dengan belanja langsung sebagai variabel dependen. Maka, persamaan penelitiannya adalah $Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$, Dimana: y: belanja langsung, α : konstanta, $b_{1,2,3}$: koefisien variabel independen, x_1 : pajak daerah, x_2 : retribusi daerah, x_3 : lain-lain pad yang sah dan e: residual error.

3. Hasil Dan Pembahasan

Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Jumlah anggaran tersebut dimaksudkan untuk membiayai upah kerja (honorarium), belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sepanjang keberadaannya, belanja daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun (Tabel 2). Pada tahun 1982 jumlah belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 1.418.430.689.93, selanjutnya rata-rata terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp573.058.068.839.00 pada tahun 2003 atau meningkat sebesar Rp 197.320.979.836.88 dari tahun 2002.

pada tahun 2004 jumlah belanja langsung Pemerintah Aceh Utara turun hingga mencapai Rp 477.295.245.792.00 atau turun sebesar Rp - 95.762.823.047.00 dari tahun 2003. Menurunnya belanja langsung Pemerintah Aceh Utara tahun 2004 ini adalah disebabkan beberapa hal antara lain terlambatnya penetapan APBD Kabupaten tahun

2004, sehingga membawa dampak kepada terlambatnya proses tender pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada penyelesaian pekerjaan akhir tahun tidak selesai tepat waktunya, akhirnya dana pembiayaan kegiatan dimaksud tidak dapat dibayar seluruhnya. Disamping pada tahun 2004 tersebut dipengaruhi lagi dengan masih dilanda keadaan yang tidak menentu (konflik).

Tabel 2
Jumlah Belanja Langsung Kab. Aceh Utara
Periode 1982 – 2011 (Rp)

Thn	Jumlah Belanja Langsung	Pertumbuhan
1982	1,418,430,689.93	-
1983	2,172,809,610.38	754,378,920.45
1984	3,865,559,692.38	1,692,750,082.00
1985	3,512,312,721.18	-353,246,971.20
1986	4,808,944,528.12	1,296,631,806.94
1987	3,862,234,667.78	-946,709,860.34
1988	13,994,645,838.50	10,132,411,170.72
1989	22,867,069,329.87	8,872,423,491.37
1990	27,235,506,288.50	4,368,436,958.63
1991	30,029,667,359.14	2,794,161,070.64
1992	38,136,948,483.30	8,107,281,124.16
1993	31,815,189,971.25	-6,321,758,512.05
1994	27,265,920,775.90	-4,549,269,195.35
1995	29,337,458,066.85	2,071,537,290.95
1996	33,927,271,884.39	4,589,813,817.54
1997	43,824,950,931.75	9,897,679,047.36
1998	40,615,554,776.85	-3,209,396,154.90
1999	61,762,705,619.60	21,147,150,842.75
2000	96,013,201,823.20	34,250,496,203.60
2001	281,298,868,557.60	185,285,666,734.40
2002	375,737,089,002.12	94,438,220,444.52
2003	573,058,068,839.00	197,320,979,836.88
2004	477,295,245,792.00	-95,762,823,047.00
2005	524,072,405,932.00	46,777,160,140.00
2006	678,643,825,566.90	154,571,419,634.90
2007	624,362,078,792.18	-54,281,746,774.72
2008	773,470,288,656.02	149,108,209,863.84
2009	663,090,081,657.15	-110,380,206,998.87
2010	332,956,839,049.70	-330,133,242,607.45
2011	485,305,273,277.00	152,348,434,227.30
Rerata	210,191,881,606.02	16,129,561,419.57

Sumber: Data diolah (2012)

Pada tahun 1982 jumlah belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp 1.418.430.689.93, selanjutnya rata-rata terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp573.058.068.839.00 pada tahun 2003. Tahun 2004 jumlah belanja langsung turun yang disebabkan beberapa hal antara lain terlambatnya penetapan APBD Kabupaten tahun 2004, sehingga membawa dampak kepada terlambatnya proses tender pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada penyelesaian pekerjaan akhir tahun tidak selesai tepat waktunya, akhirnya dana pembiayaan kegiatan dimaksud tidak

dapat dibayar seluruhnya. Disamping pada tahun 2004 tersebut dipengaruhi lagi dengan masih dilanda keadaan yang tidak menentu (konflik).

Pada tahun 2005 sampai 2008 cenderung meningkat. Meningkatnya belanja langsung tersebut disebabkan oleh banyaknya hibah atau bantuan dari luar daerah terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Aceh pasca tragedi Gempa dan Tsunami Desember 2004. Namun pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan hingga tahun 2010. Baru kembali normal meningkat di tahun 2011 walaupun masih jauh lebih rendah dari tahun periode 2004-2009.

Pajak Daerah Pemkab. Aceh Utara

Perkembangan jumlah pajak daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama tiga puluh tahun terakhir, terhitung mulai tahun 1982 sampai dengan 2011. Dari Tabel 3 terlihat bahwa rata-rata-rata jumlah pajak daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp 4.108.438.362.90 atau meningkat sebesar Rp 457.277.257.59 setiap tahunnya. Jumlah pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu mencapai Rp 24.950.457.022.25 sedangkan perolehan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 8.272.603.548.56.

Tabel 3
Jumlah Pajak Daerah Kabupaten Aceh Utara
Periode 1982-2011 (Rp)

Thn	Jumlah Pajak Daerah	Pertumbuhan
1982	157.749.305.24	0
1983	280.420.726.00	122.671.420.76
1984	381.359.802.40	100.939.076.40
1985	457.775.734.78	76.415.932.38
1986	387.590.788.00	-70.184.946.78
1987	553.647.990.00	166.057.202.00
1988	609.484.614.00	55.836.624.00
1989	650.564.191.44	41.079.577.44
1990	649.366.164.97	-1.198.026.47
1991	683.172.017.71	33.805.852.74
1992	741.286.514.00	58.114.496.29
1993	1.063.852.267.00	322.565.753.00
1994	1.373.043.650.00	309.191.383.00
1995	1.454.469.514.00	81.425.864.00
1996	1.483.203.153.00	28.733.639.00
1997	1.565.893.381.00	82.690.228.00
1998	1.937.313.853.00	371.420.472.00
1999	24.950.457.022.25	23.013.143.169.25
2000	8.272.603.548.56	-16.677.853.473.69
2001	9.914.950.168.00	1.642.346.619.44
2002	5.409.192.813.95	-4.505.757.354.05
2003	2.795.101.247.00	-2.614.091.566.95
2004	4.014.534.128.00	1.219.432.881.00
2005	3.169.085.409.00	-845.448.719.00
2006	5.205.933.396.00	2.036.847.987.00
2007	5.633.681.994.56	427.748.598.56
2008	8.197.328.980.00	2.563.646.985.44
2009	10.130.341.564.00	1.933.012.584.00
2010	7.253.679.916.00	-2.876.661.648.00
2011	13.876.067.033.00	6.622.387.117.00
Rerata	4,108,438,362.90	457,277,257.59

Tahun 1999 merupakan puncak tertingginya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya objek pajak yang dilakukan oleh pemerintah pasca krisis moneter terutama naiknya pajak golongan C dan pajak air bawah tanah dan permukaan yang semula lapangan pajak provinsi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2000 pajak daerah mengalami penurunan. Penurunan ini lebih disebabkan oleh perubahan masa berakhirnya tahun anggaran 31 Maret menjadi 31 Desember, sehingga tahun pajak tersebut mulai 1 April-31 Desember 2000 (sembilan bulan), disamping penyerahan lapangan pengutan pajak untuk wilayah pemekaran Kabupaten Bireuen menjadi PAD kabupaten tersebut. Pada tahun 2001 sempat mengalami peningkatan dari tahun 2000, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis dunia dan berbagai variabel ekonomi yang melanda Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Retribusi Daerah Pemkab. Aceh Utara

Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga merupakan salah satu sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah merupakan iuran wajib rakyat Aceh Utara terhadap kas Pemerintah kabupaten Aceh Utara namun akan mendapatkan balas jasa secara langsung (kontraprestasi). Retribusi daerah diperoleh dari beberapa sumber yaitu retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, biaya pergantian KTP dan dokumen sipil lainnya, pelayanan pemakaman, parkir di jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya cetak peta, penyedotan kakus, pengolahan limbah, pelayanan tera, pelayanan pendidikan, pengendalian tower telekomunikasi, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, tempat pelelangan, terminal, parkir khusus, penginapan, rumah potong hewan, pelabuhan, rekreasi dan olahraga, penyeberangan air, produksi usaha daerah, dan sebagainya.

Perkembangan penerimaan retribusi daerah juga sama halnya dengan pendapatan pajak daerah, dimana dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan walaupun terjadi fluktuasi, namun masih dalam batas-batas kewajaran, kecuali sekali selama 30 (tiga puluh) tahun. Tentunya terdapat kebijakan dan perubahan sistem serta lainnya yang membuat retribusi naik pada tingkat sangat tinggi. Perkembangan jumlah retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Jumlah Retribusi Daerah Kab. Aceh Utara
Periode 1982- 2011 (Rp)

Thn	Jumlah Retribusi Daerah	Pertumbuhan
1982	523,386,341.60	0
1983	338,341,311.75	(185,045,029.85)
1984	550,027,022.00	211,685,710.25
1985	555,494,753.50	5,467,731.50
1986	1,051,949,899.00	496,455,145.50
1987	1,091,411,810.00	39,461,911.00
1988	579,334,590.00	(512,077,220.00)
1989	728,652,353.00	149,317,763.00
1990	1,511,841,156.50	783,188,803.50
1991	1,498,898,647.95	(12,942,508.55)
1992	1,414,338,531.17	(84,560,116.78)
1993	1,715,131,141.00	300,792,609.83
1994	1,543,408,138.00	(171,723,003.00)
1995	1,798,049,117.00	254,640,979.00
1996	1,985,562,638.00	187,513,521.00
1997	2,457,095,930.00	471,533,292.00
1998	1,790,692,473.33	(666,403,456.67)
1999	1,370,212,917.00	(420,479,556.33)
2000	708,351,868.00	(661,861,049.00)
2001	905,903,029.00	197,551,161.00
2002	1,394,016,561.00	488,113,532.00
2003	929,096,463.00	(464,920,098.00)
2004	872,322,925.00	(56,773,538.00)
2005	1,180,117,426.00	307,794,501.00
2006	12,213,848,338.00	11,033,730,912.00
2007	2,937,731,896.94	(9,276,116,441.06)
2008	4,291,655,983.00	4,262,278,664.03
2009	4,161,057,496.18	(130,598,486.82)
2010	5,237,615,665.00	1,076,558,168.82
2011	5,973,890,739.00	736,275,074.00
Rerata	2,410,983,483.91	181,683,479.91

Sumber: Data diolah (2012)

Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata jumlah penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp 2.410.983.483.91 per tahunnya selama periode 1982 sampai dengan 2011. Jumlah retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 sedangkan jumlah retribusi terendah terjadi pada tahun 1983. Fluktuasi jumlah retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama tahun 1982 hingga 2011 cukup tinggi. Pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah pasca gempa dan tsunami tahun 2004, utamanya retribusi pelayanan kesehatan yang memberikan kontribusi tertinggi.

Namun pada tahun 2007 kembali menurun. Penurunan ini diakibatkan oleh banyaknya objek retribusi yang tidak dapat dilakukan pengungutan lagi, terutama retribusi pelayanan kesehatan, sehubungan dengan adanya kebijakan pengobatan gratis warga masyarakat Aceh Utara. Selanjutnya akibat kondisi keamanan yang membaik, pada tahun 2008 retribusi di Kabupaten Aceh Utara kembali mengalami peningkatan hingga 2011. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi jasa usaha dan jasa umum.

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bukan berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan ini diperoleh dari penjualan asset, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian pembayaran, fasilitas sosial dan dan fasilitas umum, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, termasuk deviden atas pernyataan modal dan penerimaan lain-lain. perkembangan jumlah pendapatan lain-lain PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama tahun 1982-2011 dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kab. Aceh Utara 1982-2011(Rp)

Thn	Jumlah Retribusi Daerah	Pertumbuhan
1982	116,770,616.98	0
1983	91,128,075.35	(25,642,541.63)
1984	137,393,278.46	46,265,203.11
1985	183,916,764.19	46,523,485.73
1986	269,577,562.79	85,660,798.60
1987	219,866,374.02	(49,711,188.77)
1988	407,680,769.15	187,814,395.13
1989	366,999,979.48	(40,680,789.67)
1990	539,560,061.23	172,560,081.75
1991	483,454,860.52	(56,105,200.71)
1992	1,486,998,512.89	1,003,543,652.37
1993	339,139,438.64	(1,147,859,074.25)
1994	691,156,839.80	352,017,401.16
1995	501,704,080.17	(189,452,759.63)
1996	426,287,881.97	(75,416,198.20)
1997	517,482,087.21	91,194,205.24
1998	428,191,675.00	(89,290,412.21)
1999	1,098,383,387.52	670,191,712.52
2000	228,191,675.00	(870,191,712.52)
2001	1,712,196,359.96	1,484,004,684.96
2002	15,017,953,606.25	13,305,757,246.29
2003	34,304,921,173.00	19,286,967,566.75
2004	32,887,851,698.00	(1,417,069,475.00)
2005	51,019,172,861.39	18,131,321,163.39
2006	95,452,418,150.52	44,433,245,289.13
2007	92,786,429,166.68	(2,665,988,983.84)
2008	58,211,845,243.24	(34,574,583,923.44)
2009	65,633,370,544.13	7,421,525,300.89
2010	18,707,799,850.22	(46,925,570,693.91)
2011	22,419,124,648.46	3,711,324,798.24
Rerata	2,410,983,483.91	181,683,479.91

Sumber: Data diolah (2012)

Dari Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata jumlah pendapatan lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara lebih dari 16,5 triliun. Jumlah pendapatan lain-lain PAD yang Sah tertinggi terjadi pada tahun 2006, walaupun setelah tahun tersebut mengalami penurunan setiap tahun hingga tahun 2010. Sedangkan jumlah terendahnya terjadi pada tahun 1983. Namun setelah tahun tersebut perkembangan kenaikannya terus menerus

meningkat, walaupun terjadi sedikit mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2002 jumlah pendapatan lain-lain PAD mengalami peningkatan dan terus meningkat hingga tahun 2003. Peningkatan ini disebabkan terjadinya SIAPDA dari dana sebagai pekerjaan yang tidak selesai atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena keadaan konflik, dan dana tersebut didepositokan, sehingga memperoleh bunga sebagai lain-lain PAD disamping adanya penerimaan dari deviden penyertaan modal.

Selanjutnya pada tahun 2004 jumlah pendapatan lain-lain PAD kembali mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2005 hingga tahun 2006. Peningkatan ini terjadi akibat tingginya deposito pemerintah, jasa giro dan penerimaan penjualan aset pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 2007 dan 2008 kembali mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2009 hingga mencapai tahun 2011.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, penelitian ini menggunakan formulasi rumus analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Signifikansi
β ₀ (Konstanta)	0.506	0.183	0.856
X ₁ (Pajak Daerah)	0.633	5.629	0.000
X ₂ (Retribusi Daerah)	0.539	2.587	0.015
X ₃ (Lain-lain PAD yg Sah)	0.513	7.454	0.000
R = 0.964 Adjusted R Square = 0.921	df1 = 3 df2 = 26	t_{tabel} = 1.177	F_{hit} = 113.318 F_{tabel} = 2.975 Sig. F = 0.000

Sumber: SPSS 17.0 (diolah, 2012)

Berdasarkan Tabel 6 maka persamaan regresi: $Y = 0,506 + 0,633$ (pajak daerah) $+ 0,539$ (retribusi daerah) $+ 0,513$ (lain-lain pendapatan yang sah). Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa:

- 1) $\alpha = 0,506$, nilai ini menunjukkan probabilitas atau kemungkinan belanja langsung (Y) tanpa dipengaruhi oleh pajak daerah (X₁), retribusi daerah (X₂), dan lain-lain PAD yang sah (X₃). Artinya, jika pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah tidak ada, maka jumlah belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,506%.
- 2) $b_1 = 0,633$, nilai koefisien pajak daerah (X₁) adalah positif, yang menunjukkan adanya

hubungan searah antara jumlah pajak daerah dengan jumlah belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Artinya, jika jumlah pajak daerah meningkat sebesar 10% maka jumlah belanja langsung akan meningkat sebesar 6,33%.

3) $b_2 = 0,539$, nilai koefisien retribusi daerah (X₂) adalah positif, yang menunjukkan adanya hubungan searah antara jumlah retribusi daerah dengan jumlah belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Artinya, jika jumlah retribusi daerah meningkat sebesar 10%, maka jumlah belanja langsung akan meningkat sebesar 5,39%.

4) $b_3 = 0,513$, nilai koefisien lain-lain PAD yang sah (X₃) adalah positif, yang menunjukkan adanya hubungan searah antara jumlah lain-lain PAD yang sah dengan jumlah belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Artinya, jika jumlah lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 10%, maka jumlah belanja langsung juga akan meningkat sebesar 5,13%.

Dari Tabel 6 juga diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,964 yang menunjukkan kuatnya hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara sangat kuat, yaitu sebesar 96,4%. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,921 menunjukkan variasi variabel independen mampu menjelaskan sebesar 92,1% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 7,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam kajian ini.

Hubungan PAD dengan Belanja Langsung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari tiga sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. PAD ini akan digunakan untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. Untuk mengetahui hubungan PAD dengan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara, maka dilakukan dengan pendekatan uji F dengan kriteria pengujiannya adalah jika nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , maka PAD berpengaruh terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka PAD tidak berpengaruh terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan Tabel 6 nilai F_{hitung} sebesar 113,318 yang lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 2,975, sehingga secara empiris telah terbukti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Pengaruh PAD terhadap belanja langsung sangat signifikan, hal ini ditunjukkan oleh hasil perolehan nilai signifikansi

F sebesar 0% yang lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 5%. Hasil kajian ini sesuai dengan hasil penelitian Prakosa (2004), Halim (2004), Kusumayoni (2004), Ardiansyah dan Sulfa (2007), Maulida (2007) dan Rahmawati (2010). Namun hasil kajian ini bertolak belakang dengan Abdullah (2008) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Puspitasari (2008), yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja langsung.

Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Langsung Pemkab. Aceh Utara

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan positif dengan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien pajak daerah yang positif yaitu 0,633 atau 63,3%. Secara analisis juga telah terbukti bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara, hal ini terbukti dari perolehan nilai t_{hitung} pajak daerah sebesar 5,629 yang lebih besar dari nilai t_{hitung} pada taraf signifikansi α sebesar 5% atau dengan t_{tabel} sebesar 1,177.

Hasil kajian ini sesuai dengan pernyataan Abdullah dan Halim (2003), yaitu semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula belanja langsung dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar dana penerimaan pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Kusumayoni (2004) yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan dan pengaruh positif terhadap belanja langsung daerah.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak di Kab. Aceh Utara telah sesuai dengan sistim dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan target yang ditetapkan setiap tahun dapat tercapai di atas 90% bahkan ada pajak-pajak yang melebihi target yang ditetapkan. Namun hal ini perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian yang mendalam terhadap tata cara serta prosedur penetapan target dari setiap jenis pajak ada di Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan potensi yang ada dengan kelayakan besarnya target pajak yang ditetapkan setiap tahun kepada wajib pajak daerah.

Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Langsung Pemkab. Aceh Utara

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan positif dengan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien retribusi daerah yang positif yaitu 0,539 atau 53,9%. Secara empiris telah terbukti bahwa retribusi daerah dapat mempengaruhi belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara, ini menunjukkan bahwa dari perolehan nilai t_{hitung} retribusi daerah sebesar 2,587 yang lebih besar dari nilai t_{hitung} pada taraf signifikansi α sebesar 5% atau dengan t_{tabel} sebesar 1,177.

Hasil kajian ini sejalan dengan hasil penelitian Holtz *et al* (1985), Kusumayoni (2004) dan Yahya, dkk (2007), yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan dan pengaruh terhadap belanja daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi di Kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan tinggi bila dihubungkan dengan belanja langsung. Tetapi kalau dikaji secara cermat dari data target dan realisasi retribusi daerah setiap tahunnya menggambarkan bahwa adanya kesenjangan antara besarnya yang ditargetkan dengan realisasi yang diperoleh dari masing jenis retribusi daerah di Kabupaten Aceh Utara.

Hasil data menemukan ada jenis retribusi daerah yang realisasinya mencapai hampir 300% dari target, namun dipihak lain ada yang hanya mencapai sekitar 30%, 20%, bahkan ada yang nol persen (0%). Ini berarti bahwa masih ada hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya seperti dalam penetapan target retribusi yang belum mengacu kepada suatu mekanisme yang baik dan benar. Hal ini disebabkan antara lain penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, rendahnya mutu pelayanan yang dilakukan oleh petugas, kebijakan daerah yang masih belum berpihak kepada pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, disamping SDM yang mengelola PAD kurang profesional dibandingkan dengan perkembangan kemajuan informasi dan teknologi sekarang. Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara hendaknya segera melakukan penataan organisasi, sistem, personil dan kebijakan yang mendorong tumbuh serta meningkatkan PAD khususnya retribusi daerah, sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi dan meningkatkan belanja langsung Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang.

Hubungan Lain-lain PAD yang Sah dengan Belanja Langsung Pemkab. Aceh Utara

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki hubungan positif dengan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisiennya yang positif yaitu 0.513 atau 51.3%. Secara empiris juga telah terbukti bahwa lain-lain PAD yang sah dapat mempengaruhi belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara, ini dibuktikan dari perolehan nilai t_{hitung} lain-lain PAD yang sah sebesar 7.454 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi alpha sebesar 5% atau dengan t_{tabel} sebesar 1,177.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kalau dilihat dari prosentase penerimaan Lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tergolong tinggi dan sangat signifikan, sama halnya dengan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah bila dihubungkan dengan belanja langsung. Namun kalau diteliti secara seksama dan mendalam yaitu dibandingkan antara target dan realisasinya setiap tahun hanya memnicipai antara 30% - 40% dari target. Ini berarti ada hal-hal yang kurang serasi baik menyangkut sumber daya manusia, sistem atau mekanisme kerja, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dialami oleh Instansi pengelola PAD beserta instansi/dinas terkait lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan penataan dan mengevaluasi secara berkala terhadap sumber daya manusia yang menangani PAD khususnya retribusi daerah supaya sesuai kompetensi, minat, bakat, upaya kerja dan sebagainya dibidang tersebut. Dan sistem atau mekanisme kerja dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut tuntutan organisasi. Demikian juga halnya peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan keadaan faktual dilapangan dan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang ada dengan mudah dapat diterapkan dan dilaksanakan di lapangan, yang selanjutnya akan berdampak dan berhubungan dengan meningkatnya PAD khususnya retribusi daerah, serta akhirnya belanja langsung Kabupaten Aceh Utara akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pula.

4. Kesimpulan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya fluktuasi data dari penerimaan pendapatan asli

daerah tersebut. Hal-hal tersebut antara lain; Banyaknya hibah atau bantuan dari luar daerah terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Aceh pasca tragedi Gempa dan Tsunami Desember 2004, konflik, karena pada waktu tahun 2007 telah dapat dikatakan aman sehubungan dengan MOU Helsinki.

Di samping itu, terjadi krisis finansial global, pasca krisis moneter terutama naiknya pajak golongan C dan pajak air bawah tanah dan permukaan yang semula lapangan pajak provinsi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, perubahan masa berakhirnya tahun anggaran 31 Maret menjadi 31 Desember, sehingga tahun pajak tersebut mulai 1 April-31 Desember 2000 (sembilan bulan). pada tahun ini lebih disebabkan oleh, disamping penyerahan lapangan pengutang pajak untuk wilayah pemekaran Kabupaten Bireuen menjadi PAD Kabupaten tersebut. utamanya retribusi pelayanan kesehatan yang memberikan kontribusi tertinggi, SIAPDA dari dana sebagai pekerjaan yang tidak selesai atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena keadaan konflik dan dana tersebut didepositokan, sehingga memperoleh bunga sebagai lain-lain PAD disamping adanya penerimaan dari deviden penyertaan modal serta deposito pada Bank Mandiri.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa adanya hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain, semua variabel dalam penelitian ini baik pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti hanya menggunakan tiga komponen PAD bukan empat. Di samping itu, lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Utara. Maka, dalam penelitian mendatang harus mencarikan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan juga memperluas daerah penelitiannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2008). Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintahan Daerah : Studi Emperis atas Determinan dan Konsekwensinya terhadap Belanja Pemeliharaan. *Laporan Penelitian*.Bengkulu.
- Adriansyah dan Sulfa. (2008). Pengaruh Penerimaan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007, *E-Journal, Jurnal Akuntabilitas*.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.

- Halim, Abdul. (2004). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten /Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- _____. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hartati. (2009). *Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja serta dampaknya terhadap Kinerja Keuangan pada Kabupaten Kota dipropinsi Jawa Tengah*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly. (1994), Intertemporal Analisis of State and Local Government Spending: Theory and Tests, *Jurnal Urban Economic* 35: 159–174.
- Kusumayoni. (2004). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kab. Klungkung*. Tesis S2 PPS UNPAD. Bandung (tidak dipublikasikan).
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Aloksi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera, SNA IX*, Padang.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Maulida, Novi Pratiwi. (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Tesis S2 UII. Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik)*. Jawa Tengah
- Pratiwi, Novi (2007). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia*, Tesis (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Puspitasari, Noni dan Idhar Yahya. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Qanun No.1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
- Rahmawati, Nur, Indah. (2010). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Study Kabupaten /Kota di Jawa Tengah)*, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____.(2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. (2005). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sekaran, Uma. (2007). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Terjemahan)*, Edisi empat, Jakarta, Salemba Empat.
- Yuwono, Dkk.(2005). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta